KOMUNIKASI POLITIK IR. H. MUH. THORIQ HUSLER PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

YANDI AZIS

Nomor Stambuk : 10564 11081 16

24/02/2021
1 exp
Smb Alumni
R/0003/IPM/21 CD
Azi

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur.
Mahasiswa	:	Yandi Azis
Nomor Stambuk	:	10564 11108 16
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Rudi Hardi, S.Sos.,M.Si	**Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Rabu 04 November 2020.

TIM PENILAI

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (Ketua) (.....)
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si (.....)
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Mahasiswa : Yandi Azis

Nomor Stambuk : 10564 11081 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 11 April 2020

Yang Menyatakan,

Yandi Azis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Yandi Azis 2020. Komunikasi Politik Ir. H. Muhammad Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Ahmad Harakan).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk komunikasi politik Ir. H. Thoriq Husler dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu Timur dengan mendorong visi-misi yang meningkatkan kualitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan pada saat terpilih serta tekad dalam menjalankan amanah sebagai kepala pemerintahan pada saat terpilih. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Tim pemenangan, KPUD Luwu Timur, Masyarakat dan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler sebagai informan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga (3) indikator dalam Komunikasi Politik Ir. H. Muhammad Thoriq Husler, yaitu: Pertama Lingkungan Fisik yaitu terlebih dahulu melakukan pemetaan wilayah dengan mengusung program visi-misi terkait kebutuhan dari wilayah tersebut. Lingkungan fisik sejalan dengan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan yang senantiasa di sampaikan baik oleh kandidat ataupun tim sukses dalam kegiatan kampanye sesuai dengan letak geografis dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, sosial kultural yaitu hubungan sosial Muhammad Thoriq Husler dan masyarakat sangat dekat dengan keterlibatan langsung MTH dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Selain itu sosok MTH di gambarkan sebagai tokoh yang tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras dan keanggotaan lainnya, sehingga penerimaan masyarakat dalam menyerap kegiatan-kegiatan komunikasi politik dapat berjalan dengan maksimal. Dan terakhir, hubungan sosial yaitu keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung kandidat menjadikan komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat dapat dengan mudah dilakukan melalui perantara tokoh masyarakat tersebut. Selain itu pengalaman Thoriq Husler dalam dunia pemerintahan menjadi tolak ukur tersendiri bagi masyarakat dalam memantapkan dukungannya yang berarti ketokohan dari Ir. H. Muh. Thoriq Husler itu sendiri menjadi pengaruh penting dalam proses komunikasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Tokoh Politik dan Pilkada Serentak

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehinga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **"Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur".**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbung I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I selaku pembimbing II,yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang tak pernah berhenti memberi semangat dan dorongan yang luar biasa kepada penulis dan memberikan doa, motivasi, nasehat serta bimbingan dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua jurusan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Bupati Luwu Timur Ir. H. M. Thoriq Husler dan Pihak Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Kepada Masyarakat yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi terkait penelitian ini
7. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga dan saudara penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu demi kesempurnaan proposal penelitian ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 11 April 2020

Penulis,

Yandi Azis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 8
B. Konsep Komunikasi Politik 9
C. Konsep Pemilihan Kepala Daerah 21
D. Konsep Kampanye Politik 26
E. Biografi Singkat Ir. H. Muh. Thoriq Husler 31
F. Kerangka Pikir 32
G. Fokus Penelitian 33
H. Deskripsi Fokus Penelitian 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 35
B. Jenis dan Tipe Penelitian 35
C. Sumber Data 36
D. Informan Penelitian 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 38
G. Keabsahan Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 41
B. Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur 50
1. Faktor Lingkungan Fisik 51
2. Faktor Sosial Kultur 59

3. Hubungan Sosial 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi dan politik atau pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (domain) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Terlebih lagi jika kritik dan ketidaksepakatan menyangkut pusat-pusat kekuasaan, yang mengendalikan roda pemerintahan, jelas sebagai tindakan yang sulit ditemukan. Komunikasi Politik adalah suatu bidang atau disiplin menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Pengertian komunikasi politik dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbool-simbol yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Tentu saja dapat dimaklumi, mengingat pola komunikasi dalam pemberitaan, penyiaran dan pembicaraan publik, yang diunggulkan adalah demi stabilitas nasional. Sebuah jargon komunikasi politik populer pada massanya, yang menghasilkan komunikasi linier datar dalam bingkai keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Dalam nuansa tanpa gejolak dan keseragaman informasi satu arah tanpa interaksi egaliter, maka ruang-ruang publik diisi oleh komunikasi politik sebagai epigon retorika kekuasaan negara, yang cenderung mengedepankan keberhasilan dibandingkan ketidakmampuan

mengemban sejumlah tugas pembangunan untuk seluruh rakyat, tanpa diferensiasi sosial, ekonomi dan politik.

Komunikasi politik adalah fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai urat nadi proses politik. Bagaimana tidak, aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warganegara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini. Setiap struktur jadi tahu apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan informasi ini.

Komunikasi Politik adalah suatu bidang atau disiplin menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Pengertian komunikasi politik dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbool-simbol yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Menjelang pilkada serentak, setiap pasangan calon tentunya saling berlomba dalam menarik minat masyarakat untuk memilihnya, seperti dalam tujuan komunikasi politik, bahwasannya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah

Bukan hanya komunikasi politik saja yang dilakukan dengan matang dalam menghadapi persaingan pada pemilihan, akan tetapi sebuah strategi juga diperlukan, guna dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.Startegi komunikasi politik sangat diperlukan untuk persiapan dalam bersaing dengan lawan pasangan calon yang lain, serta membentuk citra yang positif dimata masyarakat. Dalam menghadapi pemilihan seperti ini, para pasangan calon, tim kampanye serta partai pengusung tentunya telah menyusun perencanaan dengan matang, agar strategi yang diusungnya tepat sasaran atau berhasil.

Dalam masa kampanye, para pasangan calon berlomba untuk menjadi yang terpilih, yang dimana masyarakat sebagai sasaran tujuan untuk menyampaikan komunikasi politik yang berkaitan dengan tujuan-tujuan politik para calon. Masyarakat adalah harapan terbesar untuk para pasangan calon, startegi yang diusung dengan matang dan terorganisir tentunya dapat menarik khalayak untuk memilihnya.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih

calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Hasil Pilkada adalah tampilnya seorang pejabat publik yang dimiliki oleh rakyat tanpa membedakan dari mana asal dan usul keberadaannya karena dia telah ditempatkan sebagai pengayom bagi rakyat. Siapapun yang memenangkan pertarungan dalam Pilkada ditetapkan sebagai Kepala Daerah. Sebagai pelaksana pemerintahan tentu pemilihan kepala daerah menjadi hal yang fundamental sehingga masyarakat benar-benar menentukan pilihannya agar kualitas pelaksanaan pemerintahan disuatu daerah dapat berjalan sesuai dengan amanat kepemimpinan di Indonesia.

Dalam konteks demokrasi, sosialiasi politik berfungsi sebagai wadah pengenalan dan edukasi politik, menjembatani kepentingan masyarakat untuk berkiprah dalam pembangunan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan peelaksanaan pemerintahan komunikasi politik berperan penting sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas tentang arah kebijakan dan program kandidat jika nanti terpilih sebagai kepala daerah.

Pada tahun 2015 Luwu Timur mengadakan pilkada untuk ketiga kalinya yang diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nomor urut satu Drs. H. M. Nur Husain - Ersa Lambang dengan perolehan suara 33,49 persen, nomor urut dua Dr.H. Baharuddin A.P, ST,MM,M.AP - Andi Baso Makmur, SE dengan perolehan suara 4,77 persen, dan pasangan incumbent Ir.H. Muh. Thoriq Husler - Irwan Bahri Syam, ST dengan perolehan suara 61.74 %.

Dengan hasil perolehan suara tersebut maka pasangan Ir.H. Muh. Thoriq Husler - Irwan Bahri Syam, ST yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2015-2019 (KPUD Luwu Timur, 2015).

Kemenangan Thoriq Husler dalam pilkada tahun 2015 merupakan kemenangan bersih tanpa proses *money politik*, hal ini terjadi karena program-program kerja unggulan yang ditawarkan oleh pasangan ini yang betul betul pro rakyat, serta pendekatan Muh. Thoriq Husler kepada masyarakat Luwu Timur sangatlah baik karena beliau tidak memandang perbedaan ras, suku, serta agama. Karena hal inilah sehingga Muh. Thoriq Husler dapat memenangkan pilkada di Luwu Timur di tengah-tengah perbedaan etnis. Muh. Thoriq Husler merupakan kandidat yang telah menjabat sebagai wakil bupati pada periode sebelumnya. Salah satu alasan yang sering muncul dalam proses pemilihan kepala daerah adalah menguatnya sentimen etnik (primordialisme) yang lebih terkait pada persamaan etnis, aliran, ikatan darah dan agama yang ternyata juga dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat untuk menentukan pemimpin di daerahnya, sehingga inilah *personal branding* yang dimiliki Muh. Thoriq Husler karena telah mampu memenangkan pilkada pada tahun 2015 sehingga nantinya Thoriq Husler dapat dimanfaatkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sosok Muh. Thoriq Husler merupakan seorang figur bagi semua kelompok masyarakat. Beliau dapat dijadikan sebagai panutan dalam pelaksanaan aturan yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Mentri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler dalam mengahadapi Pilkada serentak Kabupaten Luwu Timur yang menjadi fokus penelitian adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses pelaksanaan komunikasi politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah:

Untuk mengetahui proses pelaksanaan komunikasi politik Ir. H. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu

pengetahuan hususnya pada, Komunikasi Politik Ir. H. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana komunikasi politik dalam mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya pada suatu pemilihan pada kasus ini pemilihan kepala kepala daerah Kabupaten Luwu Timur.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Manggala (2015)	Komunikasi politik kiai dalam penyampaian pesan politik kepada masyarakat kabupaten situbondo	• Deskriptif Kualitatif • Purposive sampling	Hasil dari penelitian ini adalah terbukti apabila tokoh masyarakat, yang dalam hal ini adalah pesan dari seorang kiai. Akan sangat berpengaruh pada prosentase hasil suara dalam pemenangan pilihan gubernur jawa tengah 2013.
2.	Suparman (2014)	Strategi komunikasi politik caleg dalam pemenangan pemilu (studi kualitatif partai golkar JATENG dalam pemilu legislatif 2014)	• Deskriptif Kualitatif • Studi Kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik caleg Golkar antara lain melakukan komunikasi dengan pesan persuasif yang dilakukan secara masif dengan cara door to door, silaturahmi dengan simpatisan dan konstituen, yang melibatkan tim sukses, jaringan tokoh masyarakat terbukti sepuluh calon legislatif berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Strategi ini dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik yakni, partisipasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekruitmen politik .
3.	Budiyono (2016)	Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang PILKADA DKI JAKARTA 2017	• Kualitatif • Studi Kasus	Media sosial dalam bahasan penelitian ini adalah facebook, bisa dimanfaatkan menjadi sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam proses kehidupan demokrasi. Dalam demokrasi di era digital ini, khususnya pada konteks kampanye politik, media sosial telah berperan menjadi alat komunikasi yang bisa menghubungkan para pelaku politik dengan konstituennya, antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat masif.

				Masing-masing pelaku politik dan partisipannya bisa mengekspresikan kepentingannya atau hak-hak politiknya secara bebas tanpa penghalang yang menghambat proses komunikasi politik

B. Konsep Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Rachmiatie, 2013)

(Cangara, 2009) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebagai acuan dasar dalam merencanakan strategi politik agar berjalan dengan baik. Pertama, bahwa berbagai hal yang dikatakan orang tentang dirinya (kanidat) itu adalah tidak penting dan tidak perlu di sikapi secara mendalam. Biarkan orang mengatakan apapun tentang dirinya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang telah atau akan dilakukan, bukan apa yang mereka katakan. Kedua, pemilikan atas pemikiran yang strategis. Pemikiran tersebut bersifat tidak habis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu membuat berbagai perencanaan yang bersifat dinamis. Menjadi ahli strategi bukan ahli taktik yaitu dengan melihat

apa yang ada diatas perang itu sendiri, dan lebih melihat pada tujuan jangka panjangnya, bukan tentang apa yang akan dinikmati hari ini.

Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang baku dalam menyusun (membangun) dan menerapkan strategi (Tahir, 2013). Strategi dapat diterapkan dalam membangun perekonomian, menyelesaikan konflik sosial, persaingan dalam bisnis, akulturasi budaya, hingga membangun pertahanan negara. Berbagai strategi itu pun dapat diterapkan dalam bidang politik, termasuk untuk memenangkan kanidat dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Menurut Kotler dalam (Sutarso, 2011) pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Apabila dikaitkan terhadap dunia politik, definisi tersebut sejalan dengan strategi pembangunan komunikasi politik. Di dalam komunikasi politik seorang kanidat harus berupaya menawarkan berbagai solusi alternatif terhadap permasalahan masyarakat. Janji-janji politik seorang kanidat harus memperlihatkan kemampuannya dalam memberikan kepuasan dan kebahagian konstituen. Sedangkan, konstituennya diharapkan dapat menetapkan pilihan (memberikan suaranya) kepada kanidat.

Komunikasi merupakan upaya membangun pencitraan dan gerakan politik yang baik. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui guna membangun komunikasi yang baik (strategi komunikasi), yaitu (Subaktio & Ida, 2012):

1. Mendengarkan, beraksi (berdiskusi) dan menanggapi
2. Mengungkapkan kebutuhan dan keinginan

3. Memberikan informasi sebaik mungkin
4. Persuasif dan
5. Negosiasi

Menurut penyampaian informasi perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu (Tabroni, 2012):

1. Penyampaian informasi harus steril dari indikasi adanya orang luar atau hal-hal yang dapat menggangu (tingkat keamanan);
2. Berapa jumlah tim yang menerima informasi dan seberapa jauh jangkauan informasi dapat tersampaikan;
3. Seberapa cepat umpan balik (*feedback*) yang diterima dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi;
4. Berapa biaya yang diperlukan dalam penyampaian informasi untuk mencapai tahap berikutnya.

Hal-hal di atas menjelaskan bahwa komunikasi (informasi) dapat dibedakan dalam dua aspek. Komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal bersifat rahasia dengan jumlah partisipasi rendah. Komunikasi eksternal bersifat terbuka dan harus disebarkan secara luas.

Selain itu, terdapat beberapa strategi lain yang dapat diterapkan atau dikaitkan dengan strategi politik. Contoh, strategi keluarga dalam mencukupi keutuhannya. Strategi keluarga *(coping strategy)* dalam upaya menanggulangi perubahan kebutuhan yang dihadapi, suami istri biasanya melakukan penghematan atau mengganti kebutuhan tertentu dengan alternatif lain yang setara namun lebih terjangkau. *Coping strategy* dapat dibedakan dalam tiga (3)

bentuk, strategi penghematan *(Cutting Back)* yang dilakukan dengan mengurangi pengeluaran, strategi penambahan pendapatan *(Generating Income)* dan hutang ataupun bantuan. Apabila dikaitkan dengan politik, hal itu sejalan dengan strategi politik calon bupati saat mengalami kemacetan terhadap pendanaan kampanye. Langkah- langkah yang dapat dilakukan melalui penghematan *(Cutting Back)*, mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan *(Generating Income)* dengan mencari bantuan (hutang) pada orang dan lembaga pendukung (Anshari, 2013). Dalam hal ini, keterlibatan partai politik sebagai *suplayer* pendukung dalam pilkada harus dapat diberdayakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya menyokong pendanaan kampanye politik para kanidat. Strategi ini juga dilakukan untuk menekan atau mengefektifkan dana kampanye politik dengan lebih bijak dan tepat sasaran.

(Tabroni, 2012) tentang strategi bersaing menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan strategis generik yang potensial untuk mengungguli pesaing, yaitu:

1. Keunggulan biaya menyeluruh (maksimalisasi dana kampanye)
2. Diferensiasi (penyebaran wacana politik atau pencitraan politik)
3. Fokus

Strategi mengungguli pesaing tersebut mampu menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi hal negatif gerakan politik. Pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh kanidat untuk menekan persaingan terbuka atas ketidakstabilan dilapangan adalah melalui metode *ofensif* (serangan) dan

defensif (bertahan).

Sikap *ofensif* digerakkan ketika kanidat memiliki keyakinan yang matang atas kemampuan pribadinya. Strategi ini dilakukan untuk memperluas pasar dan menembus pasar baru, sebagai upaya meningkakan jumlah pemilihnya. Oleh karena, kanidat harus *kapabel* dalam menawarkan solusi-solusi strategis terhadap wacana-wacana (permasalahan) yang berkembang di masyarakat (Cangara, 2009). Strategi *defensif* dimunculkan apabila kanidat ingin mempertahankan mayoritas suara yang diperolehnya. Sehingga langkah yang ditempuh adalah untuk menjaga stabilitas suara pemilihnya, agar tidak beralih pada kontestan (kanidat) lain.

Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak, saling berbagi informasi, gagasan atau sikap, saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan, penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta (Anshari, 2013). Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya (Rahman, 2018).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih. Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan permuasan keinginan (*statement of intent*) belaka (Rahman, 2018).

Definisi Komunikasi Politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat

mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Budiyono, 2015).

Orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas. Pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan, nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian, dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu (Rachmiatie, 2013).

Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidak-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat (Anshari, 2013).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan public opinion (pendapat umum) dan bisa pula menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Adapun tujuan komunikasi politik yaitu (Adawiyah, 2019):

1. Membangun Citra Politik

   Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan actual.

2. Membentuk dan Membina Pendapat Umum

   Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Memang pers, radio, film dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik

3. Mendorong Partisipasi Politik

Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang (khalayak) mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum.

Komunikasi Politik ialah satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Maka jika bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain, dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Rachmiatie, 2013).

Ada tiga elemen dasar dalam komunikasi sebenarnya (Tulasi, 2012). Pertama, yang disebut dengan *communication ideology* atau penyampaian nilai-nilai atau ideologi yang disampaikan oleh komunikator. Kedua, disebut dengan *emotional quality* atau perasaan emosional yang dimiliki oleh khalayak pada saat komunikasi terjadi. Ketiga, yang membawa pesan komunikasi bermakna adalah core argument atau argumentasi intinya. Maka, jelas dari yang dijelaskan oleh Aristoteles di atas bahwa pesan komunikasi mempunyai power atau kekuatan untuk menyampaikan keinginan, nilai, ideologi, pemikiran, opini, dan sebagainya dari para peserta komunikasi, terutama dalam komunikasi persuasi untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator.

Komunikasi terdiri dari proses yang di dalamnya terdapat unsur atau komponen. Ruang Lingkup Ilmu Komunikasi berdasarkan komponennya terdiri dari (Ahmad, 2012):

a. Komunikator (*communicator*)

Komunikator sering juga disebut sebagai sumber atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *source*, *sender* atau *encoder*.

b. Pesan (*message*)

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda.

c. Media (*media*)

Media dalam proses komunikasi yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media yang digunakan dalam proses komunikasi bermacam-macam, tergantung dari konteks komunikasi yang berlangsung dalam proses komunikasi tersebut.

d. Komunikan (*communicant*)

Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau Negara. Selain itu, dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber.

e. Efek (*effect*)

Efek, dampak atau pengaruh merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi. Namun, efek ini muncul sebagai akibat dari proses komunikasi

yang telah dilakukan. Pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.

Setiap unsur jelas fungsinya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi primer komunikasi politik yaitu tujuan komunikasi. Dalam komunikasi politik, maka fungsi primer komunikasi melembaga dengan fungsi primer negara sesuai sistem politik yang melandasinya.

Metode komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam komunikasi politik adalah (Susanto, 2013): *Pertama,* Informatif Bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, dan pendapat yang benar. Penerangan mempunyai fungsi memberikan informasi tentang fakta sematamata, juga fakta yang bersifat kontroversial atau memberikan informasi atau menuntun khalayak ke arah pendapat umum. Jadi dengan penerangan (*information*) berarti, pesan-pesan yang dilontarkan, berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Kedua.* Persuasive Mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak akan diduga jalan pikirannya, dan terutama perasaannya. Metode persuasif ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan jalan untuk berfikir kritis, bahkan kalau perlu khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Dengan demikian penggunaan metode ini menganjurkan komunkator agar terlebih dahulu menciptakan situasi di mana komunikan mudah terkena sugesti. Situasi yang mudah terkena sugesti

ditentukan oleh kecakapan untuk mensugenstikan atau menyarankan sesuatu kepada khalayak. *Ketiga, E*dukatif Salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. Metode ini memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta,pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak, walaupun hal ini akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode persuasif. *Keempat,* Kursif Metode kursif berarti mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima gagasan yang dilontarkan. Pesan dari komunikator politik memuat, selain pendapat dan pengalaman juga berisi ancaman. Metode ini biasanya dimanifestasikan kedalam bentuk peraturan, perintah, dan intimidasi yang untuk pelanksanaannya didukung oleh kekuatan tangguh. Menyusun penyataan umum yang bersifat kursif tidaklah seluwes penyataan umum yang lain, dan karena memang ada kekuatan yang mendukungnya, tentu efeknya akan lebih besar.

Komunikasi politik menjadi kajian yang menarik perhatian, bukan hanya para sarjana komunikasi dan sarjana politik, tetapi juga bagi politisi yang aktif di berbagai partai politk. Bahkan Plano (Anshari, 2013) melihat bahwa "komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik". Ini menjadi sebuah

tantangan keberhasilan partai politik, gabungan partai dan tim sukses untuk mengusung calonnya sangat ditentukan oleh kemampuannya melihat tingkat atraktivitas dan akseptabilitas calon tersebut di mata masyarakat. Peranan komuniksi politik dibutuhkan untuk melihat dampak dan hasil yang bersifat politik. Melvin L DeFleur memetakan Model Transaksi Simultan (*Simultaneous Transactions Model*) terhadap dinamika komunikasi politik dengan karakternya yang nonlinier, model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam komunikasi yaitu (Susanto, 2013):

1. Faktor lingkungan fisik (*physical surroundings*), yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what* dan *how* pesan-pesan komunikasi itu dipertukarkan.
2. Faktor situasi sosio-kultural (*sociocuktural situational*), yakni bahwa komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya.
3. Faktor hubungan sosial (*social relationship*), yakni bahwa status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan itu dikirim dan diterima.

C. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai rajaraja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta *money politic* yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012)

Pelaksanaan Pilkada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut (Romli, 2018) mengatakan bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan

kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara (Kristiyanto, 2017).

Berlakunya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan melakukan perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan. Demokrasi langsung melalui pemilihan kepala daerah akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen calon ditangan segelintir orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Rajab, 2016).

Pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharap dapat didengarkan dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk Undang-

Undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat (Hanafi, 2011).

Salah satu indikator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan *universal suffrage* atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih. Bukanlah suatu kontrakdiksi bahwa di Negara demokrasi hak untuk secara teratur memilih diatur syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi misalnya, usia, minimal, sehat jasmani dan rohani (Nuryanti, 2016).

Pendaftaran pemilih merupakan tahapan kegiatan pertama penegakan *universal suffrage* dalam rangkaian kegiatan pilkada langsung. Dilihat dari tujuannya, pendaftaran pemilihan merupakan salah satu kunci keberhasilan pilkada langsung. Tahun 2018 menjadi kontestasi model pemilihan kepala daerah yang baru. Hal yang menarik dalam pegelaran pemilihan kepala daerah tahun 2018 adalah dengan memilih kepala darah secara serentak di seluruh pelosok tanah air Indonesia (Kristiyanto, 2017).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan model otonomi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan (Hanafi, 2011). Hal tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat dapat memilih siapa

yang menjadi pemimpin dan menjadi wakildalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Dedi, 2019).

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab (Muhadam & Teguh, 2015) :

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabulitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihmya
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik

6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya
8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Pemaparan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah bentuk memberikan kebebasan kepada masyarakat yang berada di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya.

D. Konsep Kampanye Politik

Kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang teroganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah (Tabroni, 2012).

Jika ditelusuri mengenai pengertian dan definisi dari kampanye politik, maka salah satu caranya adalah dengan merujuk kepada kamus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kampanye dipahamai sebgai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing merebutkan

kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara (Cangara H, 2009).

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu (Hariyani, 2018).

Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan baik kepada individu, parpol, maupun kepada perseorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan(Kurnjawan, 2009).

Kampanye politik sebagai strategi control sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik. Kampanye politik sendiri terdiri atas aktifitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak penyebar atau pemberi informasi (Fatimah, 2018).

Kampanye politik adalah suatu proses komunikasi politik, dimana partai politik atau kontestan individu berusaha mengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. Tidak hanya itu, komunikasi politik juga mengkomunikasikan intensi dan motivasi partai politik atau kontestan individu dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Partai-partai politik berusaha

membentuk image bahwa partai merekalah yang paling perduli atas permasalahan bangsa. Hal ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas harian partai. Semua hal yang dilakukan merupakan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat (Kurniawan, 2009)

Tujuan utama dari strategi kampanye politik adalah untuk membentuk opini dan simpati melalui media dengan cara menyampaikan tema, visi, misi dan program yang baik kepada khalayak. Opini bisa terbentuk berdasarkan informasi yang diterima pemilih baik secara langsung maupun melalui perantara. Kampanye politik sebagai bentuk komunikasi politik memang tidak dapat secara langsung menimbulkan perilaku politik tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak dalam mengorganisasikan tindakan dari suatu objek tertentu yang kemudian akan mempengaruhi perilaku khalayak dalam menentukan pilihan politiknya (Maliki Riri, 2013).

Komunikasi politik berimplikasi pada penagihan janji dan pertanggungjawaban sedangkan pendidikan politik berimplikasi kepada peningkatan rasionalitas dan kritisme pemilih. Pendidikan politik dalam kampanye pilkada tentu saja menjadikan warga sebagai pemilih bukan supporter. Bentuk kampanye yang sering digunakan dalam pemilu di Indonesia adalah bentuk kampanye monologis (terbuka) dan dialogis (tertutup). Bentuk kampanye monologis adalah bentuk kampanye melalui media cetak atau elektronik, sedangkan kampaye dialogis adalah kampanye terbuka yang memungkinkan adanya interaksi antara calon dan masyarakat, dengan kampaye

tersebut misi, visi dan program kerja calon tak hanya disampaikan kepada khalayak melainkan dapat diuji dan dikritisi (Cangara H, 2009).

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Adapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non verbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak. Integritas suatu pesan itu sendiri akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan itu ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari (Tabroni, 2012):

a. Format. Pesan harus disampaikan menggunakan kata-kata yang tepat, bahkan jenis huruf yang detail dan terperinci, sedangkan pesan yang serius menggunakan huruf serif. Mungkin juga menggunakan bantuan visual yang tepat untuk pesan kampanye tersebut.
b. Tone (Nuansa). Pesan harus memberikan perhatian khusus terhadap suasana hati, yaitu suasana atau gaya yang ingin digambarkan yang tersirat dalam pesan tersebut
c. Konteks. Konteks dalam pesan itu pun juga penting dalam mengundang tanggapan dari para audiens.
d. Waktu. Pesan yang hendak kita sampaikan hendaknya bersifat baru karena jika informasi tersebut sudah berlalu akan sia-sia.
e. Pengulangan. Hal ini membuat informasi lebih mudah diterima dan dicerna. Namun, hindari pengulangan yang membuat pesan tersebut menjadi tidak bernilai lagi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian (Fatimah, 2018).

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni (Fatimah, 2018):

a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptkan efek atau dampak tertentu.
b. Jumlah khalayak sasaran yang besar.
c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai (Kurniawan, 2009).

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan

yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

E. Bografi Singkat Ir. H. Muh. Thoriq Husler

Ir. H. Muh. Thoriq Husler lahir di Palopo, 19 April 1963 yang beralamat di Jl. DR Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, ia menikah dangan Dra. Hj. Puspawati. Ir. H. Muh. Thoriq Husler menumpuh pendidikan SD lulus tahun 1975, SMP lulus tahun 1979, SMA lulus tahun 1982, S1 Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 1988. Kemudian bergabung di organisasi sebagai Ketua FKPPI Kab. Luwu Timur, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Ka. Luwu Timur, Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kab. Luwu Timur, Kosgoro Kab. Luwu Timur, Ketua Dewan Mesjid Kab. Luwu Timur, Ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Kab. Luwu Timur, Ketua Himpunan Persaudaraan Haji Indonesia (HPHI) Kab. Luwu Timur, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kab. Luwu Timur, Ketua Badan Amil Zakat Kab. Luwu Timur. Sedangkan riwayat pekerjaannya pernah menjabat Sekretaris Bappeda Kab. Manatutu Prov.Timor-Timur tahun 1994-1999, Kepala Seksi Pembangunan Desa Kab. Luwu Utara tahun 2000-2001, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Luwu Utara tahun 2001-2003, Kepala Dinas Koperindag dan Penanaman Modal Kab. Luwu Timur tahun 2003-2005, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur tahun 2005-2009, Kepala Dinas Energid an Sumber Daya Mineral Kab. Luwu Timur tahun 2008-2010, Wakil Bupati Kab. Luwu Timur Periode 2010-2015.

Perjuangan dan jasa Muh. Thoriq Husler bagi masyarakat Luwu Timur pada umumnya yaitu salah satu diantaranya adalah mengembangkan kawasan ternak Luwu Timur ke level nasional. Berbagai upaya dan kiat yang pernah dilakukan oleh Ir. H. Muh. Thoriq Husler untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga Husler banyak mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat baik dibidang pendidikan, pemerintahan, dan sosial yang memiliki nilai positif bagi kehidupan masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

Sosok Muh. Thoriq Husler merupakan seorang figur bagi semua kelompok masyarakat. Beliau dapat dijadikan sebagai panutan dalam pelaksanaan aturan yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Mentri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan dari beberapa teori yang diangkat penulis dalam penelitian terkait Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten

Luwu Timur, maka diangkat kerangka pikir berdasarkan teori dari Melvin L DeFleur (Susanto, 2013) dengan pemaparan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir maka yang menjadi fokus penelitiannya adalah gaya dan proses pelaksanaan komunikasi politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur dengan mengunakan indikator faktor lingkungan fisik, faktor situasi social-kultural dan faktor hubungan social dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan yang menjadi fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian ini adalah:

1. Faktor lingkungan fisik adalah melihat bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh Ir. H. Muh. Thorig Husler dengan menekankan kepada penentuan segmen berdasarkan lingkungan masyarakat dan materi kampanye politik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sesuai arah visi pembangunan kandidat dalam kontestasi pilkada Kabupaten Luwu Timur.
2. Faktor situasi sosio-kultural adalah sosok dari Ir. H. Muh. Thoriq Husler dalam melihat visi yang mengarah kepada pembangunan masyarakat yang majemuk sebagai ciri khas dari Kabupaten Luwu Timur agar masyarakat dapat menentukan pilihan dan bagaimana kandidat memahami budaya dan kultur dari masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.
3. Faktor hubungan sosial adalah dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap Ir. H. Muh. Thoriq Husler yang memberikan pengaruh terhadap konstituen dalam menentukan pilihan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serta melihat seberapa jauh peran masyarakat tersebut dalam memberikan dukungan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan di laksanakan pada tanggal 02 September sampai dengan 02 Oktober 2020 berdasarkan surat izin penelitian No. 147/DPMPTSP/IX/2020. Sedangkan lokasi penelitian ini akan dilaksankan di Kabupaten Luwu Timur dengan berpusat di Kelurahan Malili, Kecamatan Malili tentang Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, karena dapat dengan mudah mengakses informan utama yaitu Ir. H. Muh. Thoriq Husler secara langsung dimana beliau berdomisili di wilayah tersebut. Selain itu seluruh sekretariat partai pengusung juga berada di Kecamatan Malili sehingga memudahkan pengambilan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur.

2. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.1 Tabel Informan

No.	Informan	Inisial	Instansi
1.	Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	MTH	Calon Bupati
2.	Mahading	MD	Tim Pemenangan
3.	Rostanti Darwis	RD	Tim Pemenangan
4.	Adam Safar, ST	AS	Anggota KPUD

5.	Mulyana Mulkin, S.S, M.Pd	MM	Anggota KPUD
6.	Dondi	DI	Masyarakat
7.	Rustam	RM	Masyarakat
8.	Alfian	AF	Masyarakat
9.	Saharuddin	SH	Masyarakat
10.	Iwanuddin	ID	Masyarakat
Jumlah Total		10	Informan

(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Adapaun alasan pemilihan Informan berdasarkan rujukan dari hasil observasi penulis sebagai acuan dalam penyeleseian penelitian dimana seluruh informan berdomisili di Kecamatan Malili. Informan MTH adalah informan utama dalam penelitian ini sementara informan MD dan RD adalah orang yang tergabung dalam tim pemenangan. Sementara itu AS dan MM adalah anggota KPUD sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur. Untuk informan masyarakat sendiri terbagi atas dua yaitu masyarakat yang mendukung Ir. H. Muhammad Thorig Husler adalah DI, RM dan AF. Sementara informan SH dan ID adalah informan yang memilih kandidat lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

langsung yang berkaitan dengan Komunikasi Politik Ir. H. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reducation*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan, sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.

c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak pada koordinat antara 2 0 15' 00'' – 3 0 Lintang Selatan dan 1200 30' 00'' sampai 1210 30'00'' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 694.488 ha atau 6.944,88 km2 . Secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi batasbatas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat strategis sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah hinterland, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Pada masa yang akan datang, Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai service region dan marketing outlet bagi kabupaten- kabupaten di sekitarnya.

Selain itu, bila ditinjau dari wilayah Nasional, di kabupaten Luwu Timur terdapat Kawasan Strategis Nasional, yaitu KSN Sorowako dan sekitarnya yang menjadi sentra penambangan PT. Vale Indonesia, Tbk. Penetapan KSN Sorowako mengacu pada pertimbangan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta mempunyai pengaruh luas terhadap pembangunan ekonomi sampai ke tingkat nasional, terutama karena Kontrak Karya (KK) yang ditanda tangani oleh Presiden RI (Soeharto, kala itu) baru berakhir tahun 2025.

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda dengan jumlah keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan, dan 2 UPT. Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003.

Sebaran desa di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau (18 desa), Wotu (16 desa), Tomoni (12 desa dan 1 kelurahan), Angkona (10 desa), Malili (14 desa, 1 kelurahan dan 2 UPT), Towuti (18 desa), Nuha (4 desa dan 1 kelurahan), Mangkutana (11 desa), Kalaena (7 desa), Tomoni Timur (8 desa) dan Wasuponda (6 desa).

Tabel 4.1

Luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
Burau	18	25.623	3.69	534.336	12.99
Wotu	16	13.052	1.88	449.526	10.93
Tomoni	13	23.009	3.31	404.184	9.82
Tomoni Timur	8	4.391	0.63	224.928	5.47
Angkona	10	14.724	2.12	391.974	9.53
Malili	21	92.120	13.26	463.122	11.26
Towuti	18	182.048	26.21	413.49	10.05
Nuha	5	80.827	11.64	354.882	8.63
Wasuponda	6	124.400	17.91	276.342	6.72
Mangkutana	11	130.096	18.73	421.74	10.52
Kalaena	7	4.198	0.60	179.652	4.37

(Sumber: BPS 2016)

Berdasarkan tabel 4.1 tergambar bahwa Malili merupakan kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa terbanyak yakni 21, sementara kecamatan terluas yaitu Towuti yakni mencapai 182.048 Ha, disusul dengan Mangkutana yaitu 130.096 Ha dan Wasuponda yaitu 124.400 Ha.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 4.2

Data Penduduk Kabupaten Luwu Timur

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	MANGKUTANA	11.470	10.908	22.378
2.	NUHA	12.337	10.794	23.131
3.	TOWUTI	17.006	14.982	31.988
4.	MALILI	19.948	18.257	38.205
5.	ANGKONA	12.450	11.716	24.166
6.	WOTU	15.912	15.491	31.403
7.	BURAU	17.819	17.210	35.029
8.	TOMONI	11.957	11.496	23.453
9.	TOMONI TIMUR	6.553	6.083	12.636
10.	KALAENA	5.582	5.322	10.904
11.	WASUPONDA	11.351	9.975	21.326
	Total	**142.385**	**132.234**	**274.619**

(Sumber: BPS Luwu Timur 2016)

Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dengan jumlah penduduk berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai 274.619 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh 37 4 1 % 3 4 % 9% 3% 3% 3% 3%2% penduduk dari berbagai etnik. Diantaranya etnik Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Pamona, Padoe, Sunda, Sasak, Madura, Dayak, Tionghoa, dan etnik Batak. Sejauh ini jumlah penduduk yang terbesar berasal dari etnik Jawa dan Bugis masing – masing sebanyak 41 persen dan 34 persen, menyusul etnik Toraja sebanyak 9 persen, etnik bali sebanyak 5 persen, etnik Pamona 3 persen, etnik Padoe 3 persen, kemudian sisanya 3 persen terbagi untuk etnik Sunda, sasak dan Madura, dan selanjutnya etnik –

etnik lain dalam jumlah yang relatif kecil seperti etnik Dayak, etnik Tionghoa dan etnik Batak sebanyak 2 persen.

b. KPUD

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22 E dan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dan pengaruh pihak mana pun.

Di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat hierarkis dan permanen. Disebutkan pula, bahwa KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 maka dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dilakukan pembagian tugas diantara para anggota KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk divisi.

KPU RI menerbitkan Surat Edaran nomor :1170/ORT. 02-SD/01/KPU/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 seiring dengan dibentuknya KPU Kabupaten Tasikmalaya yang baru. Dari Surat Edaran tersebut ada perubahan Nomenklatur pembagian Divisi, serta penambahan 2 Komisioner

untuk tingkat Provinsi yang tadinya berjumlah 5 orang berubah menjadi 7 orang. Untuk KPU Kabupaten tetap berjumlah 5 orang dengan perombakan pembagian Tugas divisi di KPU Kabupaten Luwu Timur.

Pembagian Divisi dan uraian tugas Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur Priode 2018-2003 adalah :

a. Ketua : Zaenal, SE (Devisi: Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga)
b. Anggota : Muhammad Abu, S.Ag (Devisi: Teknis Penyelenggaraan)
c. Anggota : Adam Safar, ST (Devisi: Hukum dan Pengawasan)
d. Anggota : Hastuti Hasan, ST (Devisi: Perencanaan, program dan data)
e. Anggota : Mulyana Mulkin, S.S, M.Pd (Devisi: Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, SDM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur dan bertanggung

jawab kepada KPU Kabupaten Luwu Timur. Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Data. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

b. Subbagian Hukum. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRDKabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan

pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

c. Biografi Singkat Ir. H. Muhammad Thoriq Husler

Nama : Ir. H. Muh. Thoriq Husler

Tempat dan Tanggal Lahir : Palopo, 19 April 1963

Alamat : Jl. DR Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Nama Istri : Dra. Hj. Puspawati

Riwayat Pendidikan : SD lulus tahun 1975, SMP lulus tahun 1979, SMA lulus tahun 1982, S1 Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 1988.

Riwayat Organisasi : Ketua FKPPI Kab. Luwu Timur, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Ka. Luwu Timur, Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kab. Luwu Timur, Kosgoro Kab. Luwu Timur, Ketua Dewan Mesjid Kab. Luwu Timur, Ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Kab. Luwu Timur, Ketua Himpunan Persaudaraan Haji

Indonesia (HPHI) Kab. Luwu Timur, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kab. Luwu Timur, Ketua Badan Amil Zakat Kab. Luwu Timur.

Riwayat Pekerjaan : Sekretaris Bappeda Kab. Manatutu Prov. Timor-Timur tahun 1994-1999, Kepala Seksi Pembangunan Desa Kab. Luwu Utara tahun 2000-2001, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Luwu Utara tahun 2001-2003, Kepala Dinas Koperindag dan Penanaman Modal Kab. 53 Luwu Timur tahun 2003-2005, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur tahun 2005-2009, Kepala Dinas Energid an Sumber Daya Mineral Kab. Luwu Timur tahun 2008- 2010, Wakil Bupati Kab. Luwu Timur Periode 2010-2015, Bupati Luwu Timur Priode 2016-2021.

Perjuangan dan jasa Thoriq Husler bagi masyarakat Luwu Timur pada umumnya yaitu salah satu diantaranya adalah mengembangkan kawasan ternak Luwu Timur ke level nasional. Berbagai upaya dan kiat yang pernah dilakukan oleh Husler untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga Husler banyak mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat baik dibidang pendidikan, pemerintahan, dan sosial yang memiliki nilai positif bagi kehidupan masyarakat.

B. Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur

Setiap kandidat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah selalu mempunyai cara tersendiri dalam mengambil simpati masyarakat salah satunya melalui komunikasi politik. Setiap kandidat melalui tim sukses

membentuk strategi dalam menyampaikan komunikasi politik yang berkaitan dengan visi misi dari kandidat yang diusung. Seperti dalam pilkada Luwu Timur Tahun 2015, salah satu kandidat dari tiga peserta yang terlibat dalam kontestasi tersebut yaitu Ir. H. Muh. Thoriq Husler berhasil memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah dengan total perolehan 844.014 suara. Dengan demikian menarik melihat bentuk komunikasi politik dari sosok kandidat Ir. H. Muh. Thoriq Husler yang lebih di kenal dengan inisial MTH melalui pendekatan 3 indikator yang di bahas dalam hasil penelitian sebagai berikut:

a. Faktor lingkungan fisik.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Isu pembangunan lingkungan bisa dijadikan sebagai salah satu pesan komunikasi politik menjelang Pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung.

Pemilihan seretak tahun 2020 juga di ikuti oleh Kabupaten Luwu Timur, daerah yang juga di kenal dengan sebutan Bumi Batara Guru ini di ikuti oleh tiga pasang kandidat salah satunya Ir. H. Muhammad Thoriq Husler yang lebih akrab disapa MTH. Fokus visi misi dari kandidat ini untuk membangun Luwu Timur yang terkemuka melalui pendekatan pembangunan dan peningkatan standar kesejahteraan masyarakat.

> "Setiap kandidat tentu memiliki strategi tersendiri dalam memperoleh simpati masyarakat, salah satunya melalui komunikasi politik yang dibangun baik oleh kami selaku kandidat ataupun tim sukses yang bekerja keras dilapangan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah

> kami memetakan berapa segmen yang masuk dalam kategori penyampaian visi misi kami, bagi masyarakat yang berada di wilayah dataran tinggi atau pegunungan kami menyusun program yang mengusung perbaikan infrastruktur terutama jalan sehingga akses masayarakat jauh lebih mudah dalam melakukan kegiatan perekonomian. Selanjutnya bagi masyarakat yang menempati daerah pesisir kebutuhan akan air bersih menjadi persoalan yang harus di selesaikan sehingga melalui pendekatan tersebut dengan meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat menempatkan pilihannya kepada kami." (Wawancara dengan MTH tanggal 16 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan komunikasi politik yang dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah dengan membangun program terkait apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendiami suatu tempat sehingga dapat dirumuskan menjadi visi misi dari kandidat.

Komunikasi politik dapat disebut sebagai himpunan kajian-kajian yang sudah lama ada, yaitu retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, dan opini publik serta kebijakan komunikasi. Semuanya itu saat ini menjadi cakupan komunikasi politik.

Faktor lingkungan fisik sangat mempengaruhi bentuk dari komunikasi politik yang di bangun oleh tim pemenangan dari kandidat MTH. Sumber daya alam yang melimpah menjadi fokus penyampaian dari komunikator kepada masyarakat. Pendekatan komunikasi tersebut mendapat respon dari masyarakat sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

> "Disetiap kampanye dengan masyarakat baik secara terbuka atau tertutup saya selalu menyampaikan bahwa daerah Luwu Timur mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa, sehingga membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki keterampilan dalam mengelola potensi tersebut. Sosok MTH yang memang

memiliki pengalaman dalam dunia pemerintahan menjadi nilai jual tersendiri bagi masyarakat sehingga masyarakat benar-benar meyakini akan program dari kandidat tersebut. (Wawancara dengan MD 17 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pengalaman sosok MTH dalam dunia pemerintahan menjadi modal berharga dari tim sukses untuk mempromosikan visi misi kandidatnya dalam rangka mengelola sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Luwu Timur pasangan MTH-Budiman yang merupakan petahana dalam kontestasi Luwu Timur dengan mengusung program unggulan yang di paparkan sebagai berikut (KPUD Luwu Timur 2020):

1. SEKTOR KESEHATAN
   1) Layananan pasca perawatan Rawat Inap (Pengantaran Pasien dari RS dan Puskesmas ke Rumah)
   2) Seluruh fasilitas kesehatan ditanggung oleh pemerintah daerah tidak ada lagi pasien yang mengeluarkan biaya termasuk biaya pemberian obat yang ditanggung oleh BPJS
   3) Pelayanan Rumah Sakit 1 Pasien 1 Kamar
   4) Pemberian Mobil Operasional Kepada Puskesmas
   5) Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
   6) Pembangunan Rumah Sakit Towoti
   7) Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Malili
2. SEKTOR PERTANIAN
   1) Mengoptimalkan peran BUMD dalam penyerapan hasil bumi

2) Peningkatan Produksi melalui penambahan indeks pertanaman
3) Mandiri Benih padi
4) Pengembangan sentra tanaman Pangan dan holtikultura
5) Menjamin ketersediaan Pupuk
6) Industrialisasi hasil pertanian
7) Memfasilitasi pemenuhan asuransi tani
8) Memfasilitasi sarana dan peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh, Pelaku utama dan Pelaku usaha sektor pertanian.
9) Peningkatan ternak sapi dan unggas.

3. SEKTOR KETANAGAKERJAAN
   1) Kerjasama Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja (Pemerintah Daerah Dan Swasta).
   2) Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Kebijakan Daerah Ramah Investasi.

Penguatan demokrasi di tingkat lokal akan menjamin mutu kepala daerah untuk dapat merencanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien. Jika masyarakat dapat memberikan sumbangsih besar pada daerahnya dengan aktif dan partisipatif pada pilkada, maka awal yang baik dari proses perencanaan pembangunan sudah dapat dipastikan.

Tantangan dari KPUD Luwu Timur dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pilkada 2015 terkendala dengan adanya beberapa daerah yang terisolir dari pembangunan seperti daerah

pegunungan, hal tersebut yang menjadi tantangan tersendiri bagi KPUD dalam melaksanakan sosialisasi kepada pemilih.

> "Salah satu yang menjadi kendala kami sebagai pihak penyelenggara dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih agar terlibat aktif dalam pemilihan umum adalah kondisi lingkungan terutama bagi masyarakat yang berada daerah pegunungan. Akses yang sulit terlebih banyak masyarakat yang beraktifitas sebagai petani menyulitkan kami untuk melakukan sosialisasi pada siang hari, sehingga di beberapa kesempatan kami meminta kepada pemerintah desa untuk ikut bekerja sama mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi. Tentu pertimbangan wilayah membuat kami sebagai pihak penyelenggara juga membutuhkan langkah-langkah agar sosialisasi terkait pemilihan dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat." (Wawancara dengan MM tanggal 18 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur menjadi tantangan tersendiri dengan adanya beberapa wilayah yang masih memiliki kesulitan akses sehingga menyulitkan kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan pilkada langsung secara serentak ini menunjukan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru menuju *good governance* dan *clean government* yang saling bersinergi dengan Nawa Cita dan pembangunan daerah. Proses demokrasi yang berlangsung di daerah merupakan siklus awal dari perencanaan pembangunan menyangkut hajat kepemimpinan untuk mendapatkan visi pembangunan.

Masyarakat cenderung memilih pemimpin yang mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri. Ketertarikan masyarakat terhadap

kandidat MTH selain karena sosok yang dekat dengan masyarakat juga program yang mengarah kepada pembangunan.

> "Perhelatan pilkada itu diikuti oleh dua pasang kandidat tapi saya memilih pasangan MTH hal tersebut karena program yang ditawarkan terkait pembangunan suatu wilayah jauh lebih menarik di banding program kandidat lainnya yang memang masih sangat minim dalam dunia politik. Perbaikan jalan tani, drainase, pembangunan pabrik, beasiswa menjadi program-program unggulan pada saat itu, terlebih pembangunan drainase menjadi kebutuhan yang teramat penting terlebih apa bila musim hujan debit air yang besar tidak dapat di tampung oleh drainase yang ada sehingga menjadikan air meluap. Melalui program MTH masyarakat meyakini bahwa memang sebaiknya pemimpin membutuhkan langkah mitigasi dalam perencanaan pembangunan." (Wawancara dengan AF 19 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa program Ir. H. Muhammad Thoriq Husler yang mengarah kepada pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa proses komunikasi politik terkait visi misi dari kandidat sangat bergantung dengan apa yang menjadi masalah dari masayarakat itu sendiri.

Gambar 4.1 Kegiatan Kampanye Politik

(Sumber: Tim Pemenangan MTH-Budiman)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pada Gambar 4.1 kegiatan kampanye politik MTH-Budiman yang bertajuk Safari desa dimana pasangan tersebut melakukan kegiatan kampanye dengan mengunjungi beberapa wilayah sebagai langkah untuk melihat potensi yang ada di wilayah tersebut yang kemudian akan di selaraskan dengan visi pembangunan pada saat terpilih sebagai kepala daerah.

Definisi putra daerah jika diartikan secara baku maupun berdasarkan landasan hukum sangatlah beragam karena tidak ada referensi yang mendukung. Namun apabila berlandaskan pada peraturan tentang pemerintahan daerah, untuk membuka pemahaman dan kepentingan demokrasi serta integrasi bangsa, pengertian putra daerah haruslah memuat ciri-ciri sebagai berikut: Mengenal daerahnya dengan secara baik, mampu menggunakan atau berbahasa daerah, memiliki visi dan misi serta karya yang jelas untuk membangun daerah, secara baik dikenal oleh masyarakat daerah dan pernah tercatat sebagai penduduk dan tinggal di daerah tersebut.

Pandangan berbeda disampaikan oleh salah satu masyarakat yang menganggap bahwa Ir. H. Muhammad Thoriq Husler tidak dapat melanjutkan atau memimpin di Kabupaten Luwu Timur karena karakternya yang tidak memahami karakteristik masyarakat dan geografis daerah tersebut.

> "Saya menilai daerah ini harus di pimpin oleh putra asli daerah, bagaimana mungkin kita memberikan kesempatan kepada pendatang sementara dia tidak memahami bagaimana karakteristik masyarakat disini, letak wilayah. Walaupun beliau adalah sosok yang berpengalaman di dunia birokrasi tetap saja membangun Luwu Timur bukan berlandaskan atas pengalaman tetapi hubungan emosional

antara pemimpin dengan daerahnya dan itu hanya ada pada sosok putra daerah." (Wawancara dengan SH 19 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan SH dapat disimpulkan alasan tidak menetapkan pilihan kepada sosok Ir. H. Muhammad Thoriq Husler karena merupakan seorang pendatang atau bukan putra asli daerah Luwu Timur sehingga dianggap tidak mampu membawa Kabupaten Luwu Timur kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan wilayah dengan mengusung program visi-misi terkait kebutuhan dari wilayah tersebut. Lingkungan fisik sejalan dengan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan yang senantiasa di sampaikan baik oleh kandidat ataupun tim sukses dalam kegiatan kampanye sesuai dengan letak geografis dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Tabel 4.3 Keterkaitan teori dan hasil penelitian

Indikator	Defenisi	Hasil Penelitian
Lingkungan Fisik	Komunikasi politik dapat di pengaruhi oleh keadaan lingkungan dari masyarakat sebagai target komunikasi kandidat. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah faktor lingkungan menjadi produk kebijakan yang ditawarkan	1) Membuat program berdasarkan kebutuhan pembangunan di setiap wilayah. 2) Menentukan segmen pemilih berdasarkan geografis

	sebagai visi misi dalam progresnya terhadap pembangunan. Sehingga biasanya dalam pemilihan umum pola komunikasi kandidat tergantung dari di mana masyarakat bertempat tinggal.	3) Membangun rumah sakit di setiap wilayah yang membutuhkan 4) Merumuskan visi misi yang mengarah kepada pembangunan lingkungan.

b. Faktor Sosio Kultural

Terdapat hubungan dialektis antara budaya dan komunikasi. Sebagai sebuah kebudayaan, komunikasi membentuk dunia komunikatif tempat dimana manusia tinggal. Namun pada saat yang sama, bagaimana manusia berkomunikasi sangat ditentukan oleh budayanya. Dalam konteks ini, proses komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tatapi juga merepresentasikan keyakinan-keyakinan bersama

Masyarakat Kabupaten Luwu Timur adalah masyarakat yang majemuk dengan beragam etnis didalamnya sheingga daerah ini sering juga di sebut sebagai Indonesia mini. Namun secara keseluruhan dalam pemilihan kepala daerah, persoalan latar belakang suku, etnis bukan menjadi sebuah permasalahan sehingga mampu menciptakan iklim demokrasi yang aman dan damai.

> "Saya selalu menyampaikan kepada seluruh tim pemenangan dan tim sukses agar tidak membawa latar belakang etnis dalam setiap kampanye. Ini memang sangat penting untuk membangun kesan kepada masyarakat bahwa pemimpin itu tidak hanya merangkul satu golongan saja, tetapi mampu merangkul semua golongan yang ada, terlebih di Kabupaten Luwu Timur masayarakatnya terdiri dari

> bermacam-macam latar belakang etnis seperti suku Bugis, suku Toraja, suku Jawa, suku Bali, suku Madura, suku Sunda, dan terdapat suku lainnya. Seorang pemimpin tidak hanya berpatokan terhadap satu suku saja tetapi semua suku-suku tersebut harus kita perhatikan dan mendapat perlindungan hukum melalui kebijakan pemerintah." (Wawancara dengan MTH tanggal 16 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman suku di Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk kemajemukan masyarakat yang menjadi ciri khas bagi daerah tersebut. Sehingga seorang pemimpin harus hadir dengan mengusung program agar mampu menjawab semua bentuk persolan berbagai suku yang ada.

Konsep pemasaran salah satunya branding bukan hanya pada usaha memasarakan produk. Tetapi konsep branding juga dianut oleh setiap calon kepala daerah dalam memperebutkan posisi sebagai kepala derah. Trand kampanye mulai bergeser dari pengerahan massa kepada kegiatan kampanye yang lebih mengutamakan pendekatan secara personal.

Kedekatan hubungan sosial antara MTH dan masyarakat menjadi modal berharga bagi para tim sukses dalam mensosialisasikan kandidatnya. Bagi masyarakat MTH merupakan sosok yang sangat peduli dengan masyarakat, kedekatan tersebut membuat pesan-pesan terkait program visi misi kandidat bisa dengan mudah di serap oleh masyarakat.

> "Sosok Muhammad Thoriq Husler memang sangat dikenal oleh masyarakat, mulai dari kesederhanaannya, tutur katanya, sopan santunnya, dia tidak membeda-bedakan masyarakat yang di temuinya. Semua sama di mata beliau tanpa memandang suku, ras dan agama. Bermodalkan hal tersebut, kami sangat gampang dalam mensosialisasikan program MTH karena mayoritas masyarakat sudah sangat mengenalnya. Dukungan masyarakat pada waktu itu memang sangat rindu dengan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat." (Wawancara dengan RD 17 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kedekatan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dengan masyarakat merupakan brand dari sosok MTH itu sendiri, kedekatan secara sosial ini membuat para tim pemenangan sangat mudah melakukan komunikasi politik terutama yang berkaitan dengan program visi misi dari kandidat.

Gambar 4.2 Menghadiri Acara Ummat Hindu

(Sumber: Tim Pemenangan MTH-Budiman)

Pada gambar 4.2 merupakan kunjungan MTH dalam acara Karya Agung Ummat Hindu. Sosok MTH dikenal oleh masyarakat sebagai karakter yang sangat toleran dalam beragama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatannya menghadiri acara keagamaan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Dewasa ini, makin banyak nya isu-isu politik di Negara kita yang berkaitan dengan SARA (suku, ras, agama). Politik yang seharusnya berjalan damai dengan tujuan untuk membangun Negara malah jutru terpecah belah hanya karena permasalahan entah itu suku, ras, atau agama orang tersebut yang mencalonkan diri. Banyak dari masyarakat melihat calon pemimpin hanya dari perbedaan-perbedaan yang semestinya tidak jadi halangan untuk orang tersebut menjabat dan menduduki kursi politik untuk memimpin suatu daerah ataupun Negara dan tidak peduli dengan kinerjanya yang bagus.

Kondisi masyarakat Luwu Timur yang terdiri dari berbagai etnis, agama, ras dan golongan tertentu menjadi perhatian penting bagi penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Luwu Timur. Larangan kampanye menggunakan isu sara di pertegas melalui UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, dengan demikian pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan aman tertib dan damai.

> "Salah satu yang menjadi perhatian kami sebagai penyelenggara adalah mensosialisasikan terkait pelarangan kampanye dengan mengangkat isu sara, baik kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial. Oleh karena itu KPUD bekerjasama dengan diskominfo Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pengawasan terhadap unsur-unsur yang berpotensi melakukan kampanye yang mengandung SARA'. Ini sangat penting untuk membangun iklim demokrasi yang aman, damai, tentram sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pilkada." (Wawancara dengan AS tanggal 18 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kampanye dengan membawa materi isu-isu tentang suku, agama, ras mendapat perhatian berlebih dalam penyelenggaraan pilkada Luwu Timur tahun 2015.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Mengingat kondisi masyarakat Luwu Timur yang sangat majemuk, tentu penggunaan isu SARA' dalam kegiatan kampanye dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat bagi suatu daerah.

Peranan komunikasi politik sangat berpengaruh bagi kontestan mengemas untuk dirinya agar masyarakat tertarik memilih dirinya menjadi seorang pemimpin. Ketertarikan tentang pemilih, kualitas orang yang dipilih dan teori mengenai perilaku pemilu secara sosiologis, psikologi dan model pilihan rasional.

Sebagai seorang incumbernt bupati Ir. H. Muhammad Thoriq Husler memang memiliki elektabilitas yang tinggi di banding para pesaingnya. Image seorang MTH yang di kenal memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat menjadi salah satu pendorong masyarakat menentukan hak pilihnya tanpa memandang lagi visi misi yang di usung oleh kandidat.

> "Seorang Husler merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Beliau selalu hadir di tengah masyarakat baik di acara duka seperti meninggal, acara pengantin, acara akikah bahkan acara-acara keagamaan. Beliau sangat terbuka saat di temani berdiskusi terkait kemajuan daerah, sehingga memang dalam pilkada kali ini persoalan visi misi bukan lagi menjadi prioritas, tapi lebih kepada ketokohan dari bapak Husler itu sendiri." (Wawancara dengan DI 19 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ketokohan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler yang memiliki kedekatan secara sosial terhadap masyarakat Kabupaten Luwu Timur menjadi *brand image* tersendiri bagi kandidat tersebut. Sehingga selain memudahkan bentuk komunikasi politik juga mendapat dukungan dari simpatisan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Citra kandidat politik pada dasarnya dapat dibentuk dari sejumlah kesan atau persepsi masyarakat terhadap ketokohan kandidat tersebut. Citra kandidat juga berkaitan dengan sosialisasi politik, karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman. Citra politik akan selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan dan pengalaman politik seseorang.

Kedekatan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dengan masyarakat hanya di anggap sebagai proses pembangunan *Image* saja agar dipilih oleh masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Atas dasar tersebut masyarakat sudah jenuh dengan tipycal pemimpin yang hanya sekedar pencitraan tanpa memiliki visi kepemimpinan yang jelas.

> "Bupati itu adalah sosok yang berwibawa, memang benar kita membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar dekat dengan masyarakatnya tetapi harus dilandasi dengan visi pembangunan yang jelas. Saya pribadi sudah bosan dengan pencitraan elit-elit politik yang seolah-olah sangat bermasyarakat namun tidak memiliki prestasi sedikitpun dalam dunia birokrasi" (Wawancara dengan ID 19 September 2020)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya pandangan yang berbeda dalam menentukan seorang pemimpin dengan tidak hanya melihat dari karakter pemimpin yang bermasyarakat tetapi lebih kepada sosok pemimpin yang benar-benar memiliki orientasi yang jelas dalam rangka menjalankan dunia pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait situasi sosial kultural dalam Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari hubungan

sosial Muhammad Thoriq Husler dan masyarakat sangat dekat dengan keterlibatan langsung MTH dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Selain itu sosok MTH di gambarkan sebagai tokoh yang tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras dan keanggotaan lainnya, sehingga penerimaan masyarakat dalam menyerap kegiatan-kegiatan komunikasi politik dapat berjalan dengan maksimal.

Tabel 4.4 Keterkaitan teori dan hasil penelitian

Indikator	Defenisi	Hasil Penelitian
Faktor Sosio Kultural	Komunikasi Politik yang mengarah kepada pendekatan sosio kultural adalah penerapan konsep interaksi sesuai dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam pemilihan umum setiap kandidat selalu melakukan pendekatan kebudayaan sebagai sebuah identitas dukungan kandidat terhadap budaya tertentu.	1) Melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh adat. 2) Menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan 3) Membangun visi misi dengan memperhatikan pemenuhan semua kebutuhan adat-adat yang ada di Kabupaten Luwu Timur

c. Hubungan Sosial

Pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan

ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di desa kapitu kecamatan amurang barat kabupaten minahasa selatan, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya.

Dukungan dari elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kemudahan dalam penyampaian program visi misi dari sosok kandidat Thoriq Husler. Terlebih ketokokohan di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi salah satu budaya yang masih di pertahankan sebagai bentuk rasa hormat dari masyarakat terhadap orang-orang yang di jadikan sebagai panutan dalam kehidupan.

> "Kami mendapatkan dukungan dari elit-elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga memudahkan komunikasi politik kami terhadap pemilih. Masyarakat kami masih sangat menghargai yang namanya ketokohan, karena sosok tokoh mempunyai peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat masih memegang teguh bahwa jika sosok tokoh saja masih memberikan dukungan terhadap MTH kenapa kita sebagai masyarakat harus berpaling." (Wawancara dengan MTH tanggal 16 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kehadiran tokoh masyarakat dan elit politik dalam memberikan dukungan terhadap Thoriq Husler juga ikut mempengaruhi dukungan masyarakat. Hal tersebut dapat menandakan bahwa kehadiran sosok tokoh masyarakat sebagai media komunikasi yang masih berjalan di Kabupaten Luwu Timur.

Secara intern tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya

tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang mudah diperoleh. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat makin kritis. Dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang telah dianggap telah menyimpang dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. masyarakat mulai berani menyatakan sikap dan mengungkapkan berbagai penyelewengan yang ada. Semua ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat.

Program visi misi Thorig Husler sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam menuju Luwu Timur terkemuka. Visi misi yang mudah di paparkan dan dijelaskan membuat masyarakat juga dapat dengan mudah menangkap alur dalam pelaksanaan program nantinya, sehingga tidak muncul stigma masyarakat bahwa visi mis tersebut hanya sekedar janji kampanye.

> "Dalam membangun visi misi haruslah rasional dengan memperhatikan anggaran daerah dan kebutuhan prioritas masayarakat. Program MTH dapat dengan mudah di jabarkan kepada masyarakat mulai dari pelaksanaan, anggaran yang digunakan dan target sasaran dari program sehingga mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat. Karena penjabaran program yang terbilang sangat sederhana dan sangat rasional tentu akan memudahkan bentuk penyampaian isi pesan terhadap masyarakat." (Wawancara dengan MD 17 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam menjabarkan program visi misi MTH memberikan dampak penyampaian pesan yang mudah di serap oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa memberikan penilaian tersendiri terhadap visi misi kandidat.

Gambar 4.3 dukungan tokoh masyarakat terhadap MTH

(Sumber: Tim Pemenangan MTH-Budiman)

Pada gambar 4.3 menunjukkan dukungan dari salah satu toko masyarakat desa Tabaroge, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terhadap sosok MTH. Alasan dukungan tersebut adalah karena MTH merupakan sosok pemimpin yang sederhana dan sangat merakyat, sehingga menjadi alasan dirinya terus mendukung Husler ketika Pilkada Luwu Timur dilangsungkan.

Pilkada langsung dan serentak, dalam seruan tersebut, adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pascakejatuhan rezim Orde Baru. Sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai, berkualitas, dan

berintegritas. Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pilkada adalah pula mekanisme evaluasi atas kepemimpinan yang telah berlangsung sebelumnya dan proyeksi atas kepemimpinan yang diidamkan untuk masa lima tahun berikutnya.

Sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur, KPUD turut serta mengajak kepada setiap tim dari peserta pilkada agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai sebuah bentuk penyampaian komunikasi yang baik dengan membangun relasi langsung dengan para tim pemenangan kandidat.

> "Pelaksanaan pemilihan bupati tentu akan berjalan dengan maksimal jika semua agenda pelaksanaan dapat di komunikasikan, dilaksanakan dan di patuhi oleh seluruh kandidat beserta para tim pemenangannya. Dalam hal ini KPUD mendorong kepada setiap kandidat agar turut menyampaikan sosialisasi kepada masyarakt tentang pentingnya menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jika kandidat nya saja bisa berdamai terlebih setiap kandidat mengajak kesemua pendukungnya untuk tertib tentu pelaksanaan pemilihan akan berjalan hikmat sehingga menghasilkan pemilihan yang bermartabat." (Wawancara dengan AS tanggal 18 September 2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara jujur, adil dan damai jika seluruh pihak bersinergi dalam menyukseskan perhelatan pilkada, termasuk kepada para kandidat agar mensosialisasikan pentingnya menjaga ketertiban dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah.

Dalam pemilihan kepala daerah, sangat perlu bagi kandidat untuk mensosialisasikan dirinya (dan atribut yang disandangnya) kepada

masyarakat pemilih. Baik kandidat tersebut sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat, latar belakang pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Untuk itulah, pemasaran politik (*political marketing*) akan sangat diperlukan, baik oleh kandidat agar masyarakat mau memilihnya, maupun oleh tim sukses agar masyarakat mau membeli produk yang ditawarkan.

Para pendukung dan simpatisan Thoriq Husler yang terdiri dari elemen masyarakat memantapkan dukungan terhadap sosok MTH karena ketokohan dan pengalamannya terhadap dunia pemerintahan. Tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik jika pemimpin merupakan orang yang berpengalaman dalam mengurusi segala bentuk kebijakan.

> "Kenapa kami menentukan pilihan terhadap sosok Thoriq Husler karena beliau adalah tipikal pemimpin yang dekat dengan masyarakat, kedekatan tersebut dinilai mampu menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu pengalamannya di dunia pemerintahan sudah tidak bisa di ragukan lagi, pernah menjabat wakil bupati dan selaku incumbent bupati tentu segala persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan dalam program-program yang diusung." (Wawancara dengan RM tanggal 19 September 2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ketokohan dari Ir. H. Muhammad Thoriq Husler sangat di kenal oleh publik atas hubungan sosial yang terbangun dengan masyarakat serta di dukung pengalaman di dunia pemerintahan menjadi masyarakat memantapkan pilihannya terhadap sosok Thoriq Husler.

Pilkada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai

gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di desa, kecamatan, dan kabupaten, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya.

Sebagai mantan bupati dua priode yang juga pasangan Ir. H. Muhammad Thoriq Husler di priode sebelumnya, bapak A. Hatta Marakarma justru menetapkan pilihan kepada kandidat lain, hal tersebut juga mempengaruhi beberapa kelompok masyarakat dan simpatisan beliau sehingga tidak memberikan dukungan kepada sosok MTH.

> "Jika pak Husler itu memang memiliki visi yang jelas dalam menjadi bupati tidak mungkin Opu Hatta mengalihkan dukungannya kepada kandidat lain. Opu Hatta yang benar-benar memahami kebutuhan Luwu Timur beliau yang tau betul siapa yang pantas memimpin daerah ini, Opu Hatta juga adalah salah satu tokoh pemekaran Lutim, kenapa saya tidak memilih pak Husler karena alasan tersebut, kami masih loyal dengan Opu Hatta." (Wawancara dengan SH tanggal 19 September 2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pengaruh sosok Bupati dua priode Kabupaten Luwu Timur Andi Hatta Mrakarma yang akrab disapa Opu Hatta membuat beberapa masyarakat yang masih loyal terhadapnya juga mengikuti langlah dan arah politik yang di ambil beliau dalam menentukan pemilihan dalam pilkada Luwu Timur.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait hubungan sosial dalam Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung kandidat menjadikan

komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat dapat dengan mudah dilakukan melalui perantara tokoh masyarakat tersebut. Selain itu pengalaman Thorig Husler dalam dunia pemerintahan menjadi tolak ukur tersendiri bagi masyarakat dalam memantapkan dukungannya yang berarti ketokohan dari Ir. H. Muh. Thoriq Husler itu sendiri menjadi pengaruh penting dalam proses komunikasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Tabel 4.5 Keterkaitan teori dan hasil penelitian

Indikator	Defenisi	Hasil Penelitian
Hubungan Sosial	Keberhasilan Komunikasi politik yang dilakukan kandidat sangat bergantung terhadap hubungan sosial antara kandidat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai basis massa, dengan demikian keterlibatan tokoh masyarakat tersebut juga ikut mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kandidat.	1) Mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat 2) Melakukan kampanye dengan pendekatan ketokohan masyarakat. 3) Merumuskan program dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat yang mengetahui kebutuhan dari masyarakat secara umum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur maka di peroleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Fisik dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan wilayah dengan mengusung program visi-misi terkait kebutuhan dari wilayah tersebut. Lingkungan fisik sejalan dengan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan yang senantiasa di sampaikan baik oleh kandidat ataupun tim sukses dalam kegiatan kampanye sesuai dengan letak geografis dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Sosio Kultural, hubungan sosial Muhammad Thoriq Husler dan masyarakat sangat dekat dengan keterlibatan langsung MTH dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Selain itu sosok MTH di gambarkan sebagai tokoh yang tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras dan keanggotaan lainnya, sehingga penerimaan masyarakat dalam menyerap kegiatan-kegiatan komunikasi politik dapat berjalan dengan maksimal.
3. Hubungan sosial, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung kandidat menjadikan komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat dapat dengan mudah dilakukan melalui perantara

tokoh masyarakat tersebut. Selain itu pengalaman Thoriq Husler dalam dunia pemerintahan menjadi tolak ukur tersendiri bagi masyarakat dalam memantapkan dukungannya yang berarti ketokohan dari Ir. H. Muh. Thoriq Husler itu sendiri menjadi pengaruh penting dalam proses komunikasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian terkait Proses Pelaksanaan Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur yaitu:

1. Bagi setiap kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dapat menciptakan persaingan yang sehat antarkandidat dan mengelola isu-isu secara etis dalam menjalankan pesta demokrasi.
2. Bagi KPUD sosialisasi terkait proses pelaksanaan penyelenggaran pilkada Luwu Timur harus ditingkatkan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pesta demokrasi dalam menentukan kepala daerah
3. Bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah perlu mencermati visi-misi dari kandidat dengan hasil analisis tersebut masyarakat dapat menentukan hak pilihnya dengan asas kebebasan berdemokrasi tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga dapat memunculkan pemimpin yang mampu membawa perubahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Daftar Pustaka

Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Dakwah Tabligh*.Vol13.(1).137149

Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik Di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*. Vol.8.No.13.14-16

Budiyono. (2015). Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial Political Communication Phenomenon in Social Media. *Fenomena Komunikasi Politik Dalam Media Sosial Political Communication Phenomenon in Social Media*. Vol 2 (1). Hal 143-160

Cangara H. (2009). Komunikasi Politik ;Konsep, teori dan strategi. In *Communication Science*. Jakarta:Raja Grafindo

Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal MODERAT*. Vol1.(2).217-222

El Adawiyah, S., Hubeis, A. V., Sumarti, T., & Susanto, D. (2019). Strategi Komunikasi Politik Perempuan Dalam Meraih Kepemimpinan Daerah.Vol 4. No 1 20-34. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*.

Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi*. Vol 1. No 1. 5-16

Hanafi, H.-S. (2011). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

Hariyani, H. (2018). Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang Dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah teoritis dan konsep implementasinya). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. Vol 6. No 12. 178-193

Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol 17 (2) 48-56

Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik : Idealitas dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol 12. No. 3. 257-390

Maliki Riri, I. S. (2013). Pengaruh Kampanye Politik Di Media Sosial Terhadap Opini Yang Terbentuk: Studi Kasus PILKADA DKI Jakarta 2012. *Jurnal Informatika Dan Komputasi STMIK Indonesia Jakarta*. Vol 7. No 1. hal.4

Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Don Lsu Strategis*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Nuryanti, S. (2016). Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol 19. No 2. Hal 6

Rachmiatie, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. Vol 9. No 2. 123-132

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 10. No 1. 99-101

Rajab, A. (2016). Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 46. No 3. hal 93

Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 15. No 2. Hal 143

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No. 2, hal 154-170

Subaktio, H., & Ida, R. (2012). Komunikasi politik, media, dan demokrasi. *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi*. Jakarta: Prenamedia Group

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*. Volume 1, No. 2, hlm 163-172

Sutarso, J. (2011). Pendekatan Pemasaran Politik (Political Marketing) Dalam Pemilihan Umum. Vol 3. No 1. 1-19

Tabroni, R. (2012). Etika Komunikasi Politik Dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 10. No. 2. Hal. 105-116

Tahir, L. M., Al Muzammila, M., & Salleh, M. (2013). Impak strategi politik terhadap amalan kepimpinan pengajaran pengetua cemerlang. *Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering)*. Vol 8. No 1. 77–84

Tulasi, D. (2012). Komunikasi Pemasaran. *Humaniora*. Vol 3. No.1, Hal. 215-222

Dokumen-dokumen

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

L A M P I R A N

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
No : 0200/A.3-II/II/1441/2019

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Yandi Azis
S t a m b u k : 10564 11081 16
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Komunikasi Politik Ir. Thoring Husler pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur".

Pembimbing I : Rudi Hardi, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Ahmad Harakan, S.Ip, M.H.I

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Februari 2020
D e k a n,

Dr. Hj. Nuryanti Malik, S.Sos, M.Si
NBM. 730727

Tembusan Kepada Yth.
1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0141/FSP/A.3-VIII/I/42/2021

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah

MENIMBANG	Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji
MENGINGAT	1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar
MEMPERHATIKAN	Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN	
Pertama	Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini
Kedua	Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas
Ketiga	Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Keempat	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 18 Januari 2021 M
D e k a n,

Dr. Ir. [illegible] Malik, S.Sos, M.Si
NBM : [illegible]

Tembusan :
1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 0141/FSP/A.3-VIII/I/42/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Rabu, 20 Januari 2021, Jam : 08.30 – Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
	Titel : Ir.					
1	10564 11081 16	Yandi Aziz	IP	Komunikasi Politik (Ir. H. Muh. Thoriq Husler pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur	1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 2. Ahmad Harakan,S.Sos., M.Si	1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si(Ketua) 2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
2	10564 11174 16	A. Erwin	IP	Tata kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai	1. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si 2. Fatmah Sari Rundayani R, S.IP., MA	3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 4. Fatmah Sari Rundayani R, S.IP., MA
3	10564 11121 16	Sartika Sari	IP	Efektivitas Kampanye Pemilu di Media Sosial pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Wajo	1. Dra.Hj. St Nurmaeta, MM 2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	
4	10564 11131 16	Yustika Rahma	IP	Inovasi Pemerintah gerakan Serentak Pemanpaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Lapaju Kabupaten Soppeng	1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.Si	

Makassar, 18 Januari 2021

Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos, M.Si
NBM : 730737

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji

MENGINGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Penyusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang tertampil pada surat keputusan ini

Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 04 Februari 2021 M
Dekan,

Dr. Ir. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 977.0727

Tembusan :
1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran Surat Keputusan:
Nomor : 0155/FISIP/A.5-VIII/II/42/2021
Tanggal : 04 Februari 2021

Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Jumat, 05 Februari 2021, Jam : 08.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR.	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
	YAH : M					
1	10564 11081 16	Yandi Azis	IP	Komunikasi Politik (R. H. Muh. Thorig Husler pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur	1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 2.Ahmad Harakan, S.Ip., M.Hi	1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si(Ketua) 2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si 3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si 4. Fitriani Sari Handayani R, S.IP., MA
2	10564 11174 16	A. Erwin	IP	Tata kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai	1. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si 2. Fitriani Sari Handayani R, S.IP., MA	
3	10564 11171 16	Santika Sari	IP	Efektivitas Kampanye Politik di Media Sosial pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Wajo	1. Dra Hj. St. Nurmiaty, MM 2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	
4	10564 11131 16	Yustika Rahma	IP	Inovasi Pemerintah gerakan Serentak Pemampaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Lapalu Kabupaten Soppeng	1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si 2. Ahmad Taufiq, S.Ip., M.Si	

Makassar, 04 Februari 2021
Dekan,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Tamalate Jl. Sultan Alauddin No. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 866972 Pt. 23 Fakx. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Yasdi Azis
Nomor Stambuk : 105641108116
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Komunikasin Politik Ir. H. M. Thorig Husler Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Luwu Timur

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. (Ketua)	27/1 2021	
2	Dr. Hj. Sudarmi, M.Si	26/1 2021	
3	Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	25/1 2021	
4	Fitriani Sari Handayani R, S.IP., MA	26/1 2021	

Makassar, 2021
Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERP... PENERBITAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt 5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

Nomor : 746/PSP/A.1-VIII/VIII/41/2020
Lamp : 1 (satu) Lampiran
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Yandi Aziz
Stambuk : 105641108116
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Komunikasi Politik Ir.H.M. Thorig Husler Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Luwu Timur
Lokasi Penelitian : Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 4 Agustus 2020

Ketua Prodi,

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.Fax (0411) 866 [illegible] Makassar 90221 E-mail: [illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor 995/05/C 4-VIII/VIII/41/2020 — 15 Dzulhujah 1441 H
Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal — 05 August 2020 M
Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Bupati Luwu Timur
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di –
Luwu Timur

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 746/FSP/A.1-VIII/VIII/41/2020 tanggal 4 Agustus 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	**YANDI AZIZ**
No. Stambuk	**10564 11081 16**
Fakultas	**Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan	**Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan	**Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Komunikasi Politik Ir.H.M. Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Agustus 2020 s/d 8 Oktober 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 2 September 2020

Nomor : 147/DPMPTSP/IX/2020
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada
Yth Bupati Luwu Timur
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 2 September 2020 Nomor 147/KesbangPol/IX/2020 tentang Izin Penelitian

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: **YANDI AZIZ**
Alamat	: Dsn. T. Mincarae Ds. Loeha Kec. Towuti
Tempat / Tgl Lahir	: Palopo / 27 September 1996
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nomor Telepon	: 082343164104
Nomor Induk Mahasiswa	: 105641108116
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Lembaga	: **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/ibu sebagai syarat penyusunan skripsi dengan Judul :

"Komunikasi Politik Ir.H.M. Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Luwu Timur"

Mulai : **2 September 2020 s.d. 2 Oktober 2020**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n. Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP

Andi Habil Unru, SE
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19641231 198703 1 208

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
2. Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR di Tempat;
3. Sdr. (i) YANDI AZIZ di Tempat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yandi Azis
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	11%	15 %
2	Bab 2	2%	25 %
3	Bab 3	5%	15 %
4	Bab 4	2%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Januari 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP
NBM. 137 4895

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si
NBM. 103 1102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

YANDI AZIS, dilahirkan di Kota Palopo tepatnya di Jln. Datuk Sulaiman Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara pada hari Jumat 27 September 1996. Anak keenam dari enam bersaudara pasangan Azis Dg Macenning dan Rustina.Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 269 Lambatu Desa Loeha Kecamatan Towuti pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Muhammadiyah Palopo Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Malili yang saat ini telah berganti nama menjadi SMA Negeri 12 Luwu Timur pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **"KOMUNIKASI POLITIK IR. H. M. THORIQ HUSLER PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR".**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN